

► PASAR IR. SOEKARNO

Polisi Minta Pedagang Tak Duduki Gedung Promosi

SUKOHARJO—Polres Sukoharjo menjamin keamanan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) Kota Makmur dari rencana pendudukan atau penguasaan sepihak oleh pedagang Pasar Ir. Soekarno.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Sukoharjo, AKBP Ade Sapari, saat ditemui wartawan sesuai kegiatan simulasi sistem pengamanan (sispam) kota dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2014 di Jl. Veteran, Sukoharjo, Rabu (26/2). "Bila akan menduduki gedung, itu salah. Sehingga nanti akan berhadapan dengan hukum. Pendudukan gedung bukan solusi, sehingga akan ditindak tegas. Gedung ini kan aset negara [pemerintah]," kata dia.

Untuk itu, Kapolres mengimbau pedagang tidak melanggar aturan dan memaksakan kehendak dengan menduduki eks Gedung Lawa itu. "Lebih baik cari solusi bersama, bukan memaksakan kehendak," ujar dia.

Terpisah, anggota DPRD dari Fraksi Partai

Terpisah, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Nurjayanto, saat ditemui wartawan, Selasa (25/2), mempertanyakan rencana pedagang Pasar Ir. Soekarno menduduki GPPPD.

Pasalnya, dia menjelaskan peruntukan GPPPD bukan pasar tradisional melainkan untuk etalase berbagai produk potensi daerah. Nurjayanto mengatakan sikap Pemkab Sukoharjo yang berpegangan pada hasil audit Pasar Ir. Soekarno oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) sudah benar. "Artinya, sepatutnya pedagang bersabar menunggu hasil audit dari BPK Jateng. Saya justru bertanya-tanya iktikad paguyuban pedagang yang terkesan *waton sulaya*."

Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi, menjelaskan selama ini pihaknya selalu memenuhi pengalokasian anggaran untuk penyelesaian proyek Pasar Ir. Soekarno. Artinya, DPRD Sukoharjo dan Komisi II khususnya mendukung penyelesaian proyek pasar. "Hanya, saat terjadi masalah, sudah seharusnya kita tunduk pada aturan," kata dia.

Pengendali Teknis Audit dari BPK untuk Pasar Ir. Soekarno, Chairil Anwar Lubis, menginformasikan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Pemkab Sukoharjo diagendakan Jumat (28/2). Rencananya, LHP diserahkan kepada Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, di Kantor BPK Perwakilan Jateng, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175 Pudak Payung, Kota Semarang.

Seperti diberitakan, pedagang Pasar Ir. Soekarno, selain menyiapkan gugatan perdata juga berencana menduduki secara paksa Gedung Promosi, Jumat, bersamaan dengan keluarnya hasil audit BPK. (Kurniawan)